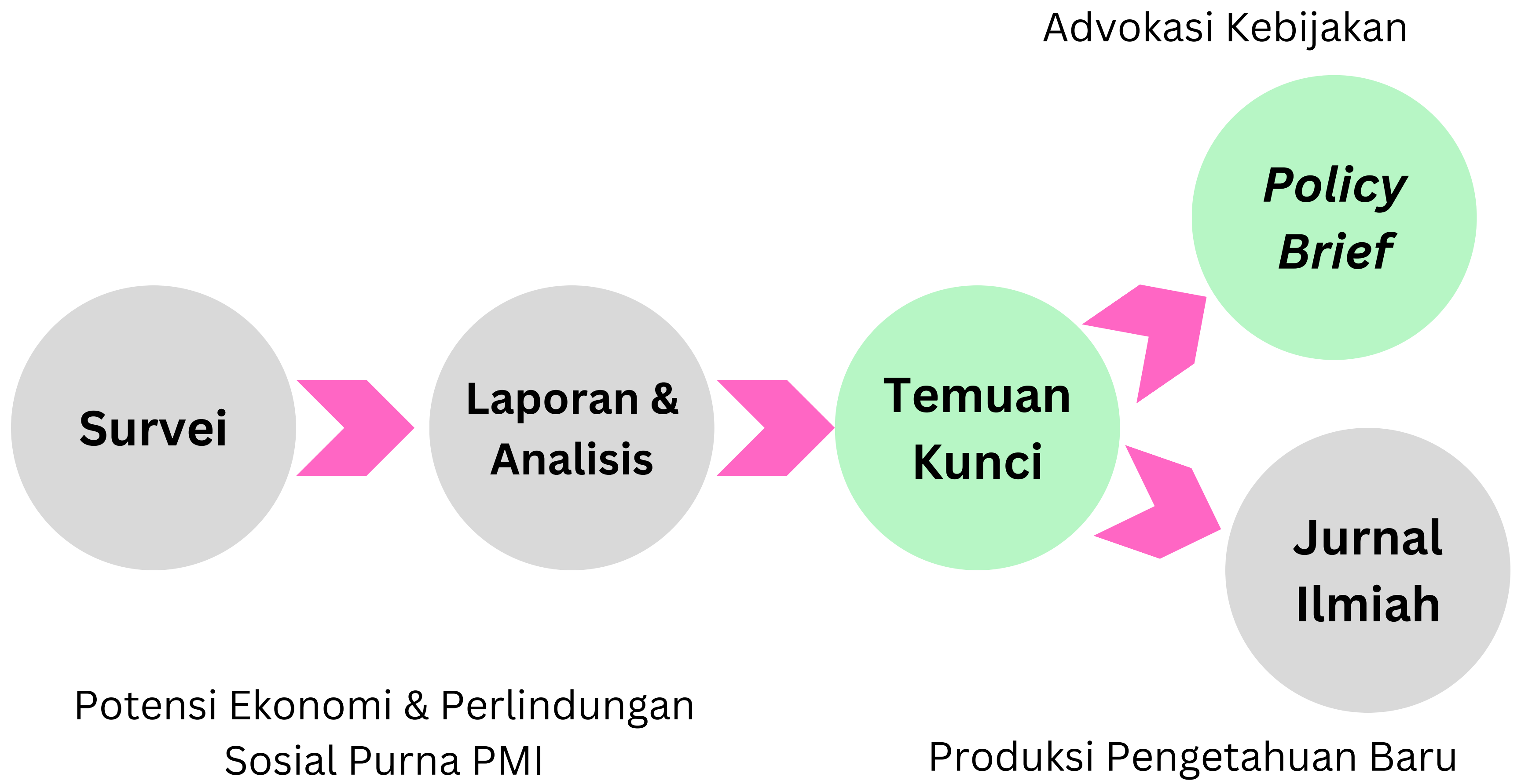




# **Temuan Kunci (*Key Takeaways*) Hasil Survei Potensi Ekonomi & Perlindungan Sosial Purna PMI**

Yanu Endar Prasetyo

Bogor, 22 Januari 2025





# POTENSI EKONOMI

## Temuan Kunci (*Key Takeways*) Hasil Survei Potensi Ekonomi Purna PMI

**1**

**Usaha yang dikelola Perempuan Lebih Bertahan**

74% usaha yang dikelola Purna PMI Perempuan lebih mampu bertahan (laki-laki 68%)

**2**

**Skala Usaha Masih Kecil (mikro)**

85,6% usaha yang dikelola Purna PMI memiliki atau hanya menyerap 1-2 orang tenaga kerja.

**3**

**Omzet masih rendah**

Baru sekitar 57,6% usaha yang memiliki omzet di atas Rp. 5 juta/bulan.

**4**

**Laba usaha masih minim**

55,6% usaha hanya memiliki laba di bawah Rp. 1 juta/bulan

## Temuan Kunci (*Key Takeways*) Hasil Survei Potensi Ekonomi Purna PMI

5

### Rendahnya Akses Permodalan

77,8% usaha hanya mengandalkan tabungan pribadi sebagai modal usaha.

6

### Minimnya Literasi Kewirausahaan

Usaha olahan makanan dan toko kelontong menjadi pilihan di sebagian besar daerah; Perlu diversifikasi.

7

### Hambatan Legalitas

87,2% usaha Purna PMI tidak memiliki izin resmi, dan 95% belum tersertifikasi.

8

### Pasar Terbatas

86% usaha hanya melayani pasar lokal (sekitar lingkungan desa dan kecamatannya saja).

# Alternatif Kebijakan Penguatan Keberlanjutan Usaha Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)

## Peningkatan Akses Modal

- Menyediakan program pendanaan inklusif yang ditargetkan untuk purna PMI.
- Membangun pusat layanan bisnis/usaha/koperasi khusus untuk purna PMI di daerah kantong migran.

## Peningkatan Literasi Keuangan, Kewirausahaan & Digital

- Mengadakan pelatihan berkelanjutan terkait pengelolaan usaha, pemasaran digital, dan literasi keuangan yang khusus menasar/menjangkau purna PMI (misal, pulang dari LN langsung bisa mendaftar pelatihan/program)
- Melakukan pendampingan kewirausahaan berbasis komunitas.

## Legalitas dan Sertifikasi Usaha

- Memperluas akses informasi dan layanan bagi purna PMI untuk mendapatkan izin usaha dan sertifikasi produk
- Proses perijinan dan sertifikasi yang lebih mudah dan murah.

## Diversifikasi usaha dan Pasar

- Melibatkan UMKM purna PMI dalam rantai pasok lokal dan nasional.
- Menyediakan platform jejaring untuk berbagi praktik terbaik antar purna PMI.



**PERLINDUNGAN  
SOSIAL**

# Temuan Kunci (*Key Takeways*)

## Hasil Survei Perlindungan Sosial Purna PMI

1

**Aksesibilitas pada sebagian Bansos meningkat, tapi secara umum literasi perlindungan sosial masih rendah**

- Purna PMI yang menerima PIP, BPNT, dan PKH meningkat di tahun 2024.
- Purna PMI penerima BLTDD, BST, BPUM, dan Bansos Pemda menurun di tahun 2024.
- Secara umum Purna PMI belum memahami perbedaan, maksud dan tujuan dari masing-masing program Bansos

2

**Eksklusi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

- Banyak PMI tidak terdaftar, sehingga tidak memenuhi syarat untuk program bansos.
- Lemahnya sistem verifikasi dan pembaruan data menyebabkan banyak PMI tereksklusi dari program perlindungan sosial
- Salah satu penyebabnya adalah stigma sosial bahwa Purna PMI tidak lagi masuk kategori miskin.



# Temuan Kunci (*Key Takeways*)

## Hasil Survei Perlindungan Sosial Purna PMI

**3**

### **Cakupan Penerima BPJS Kesehatan Naik**

Purna PMI yang menerima/menjadi peserta BPJS Kesehatan meningkat hampir 40% dari tahun 2022 ke 2024.

**4**

### **Cakupan Penerima BPJS Ketenagakerjaan Turun**

Purna PMI yang menerima/menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan menurun sebesar 40% dari tahun 2022 ke 2024.

# Alternatif Kebijakan Peningkatan Akses dan Efektivitas Perlindungan Sosial untuk Purna PMI

## Peningkatan Literasi Perlindungan Sosial

- Memperbanyak pelatihan literasi sosial dan keuangan bagi purna PMI hingga di tingkat desa.
- BPJS Ketenagakerjaan perlu sosialisasi kepada purna PMI tentang prosedur kepesertaan pekerja Mandiri/Bukan Penerima Upah (BPU) secara lebih luas.

## Penguatan Data Kesejahteraan Sosial (Updating & Verifikasi)

- Menyelaraskan data PMI di DTKS/Regsosek dengan data migrasi nasional untuk memastikan inklusi yang lebih baik.
- Verifikasi dan validasi data berjenjang dari tingkat RT hingga Desa/Kelurahan dalam waktu yang berkala (setiap bulan) untuk memastikan migrasi & kematian dapat ter-update.

## Simplifikasi Prosedur & Akses Bansos

- Melibatkan masyarakat sipil untuk pendampingan dan pengawasan guna mengurangi potensi korupsi dan diskriminasi Bansos, khususnya di level Desa.
- Sosialisasi metode usul-sanggah dan prosedur pengaduan lainnya terkait distribusi Bansos.

**Saran  
& Masukan?**